

DISKUSI UMUM

DISKUSI

Catatan Redaksi

Selaraa Seminar ini berlangsung, dilakukan rekaraan (tape recorder) tanggapan Peserta Seminar terhadap makalah-makalah yang dipresentasi. Isi tanggapan dari para peserta cukup menarik dan menyediakan masukan positif, sehingga Redaksi merasa perlu untuk memuat seluruh isi rekaman (sudah melalui editasi) karena memuat informasi yang kiranya penting dan bermanfaat bagi para pembaca dan pengguna Prosiding ini, dalam upaya mengembangkan tanaman cendana di NTT atau di mana saja.

Tanggapan atas Makalah Frans Seda dan Aca Sugandhy

Cornells Tapatab (anggota DPR-RI asal NTT, Fraksi Golkar).

Pertanyaan ditujukan kepada bapak Frans Seda yang mengenal betul NTT baik di Flores maupun di Timor dan seluruh NTT. Apa yang **beliau** utarakan tentang masalah otonomi saya sependapat, bahwa otonomi jangan tergesa-gesa diberikan kepada tingkat kabupaten.

Ini ada alasannya oleh karena **pada tahun 1986** pernah ada seminar Otonomi Daerah, **bahwa** dari sekitar 300 kabupaten, ternyata 90 **persen** itu mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat, kira-kira 4 persen saja yang bisa membiayai diri sendiri. Di Jawa saja, Jawa timur yang kita anggap mungkin mampu ternyata hanya 6 kabupaten **yang mampu** untuk membiayai diri sendiri, selebihnya tidak mampu. Begitupun di Kalimantan **Timur, Riau**, tidak seluruh kabupaten mampu. **Oleh karena itu** maka saya sependapat bapak bahwa **sebenarnya** otonomi itu kita letakan pada **Tingkat I dulu**, kemudian Tingkat II, berdasarkan **kemampuannya**.

Ada alasan bahwa dengan otonomi **diberikan** pada Tingkat I, sangat membahayakan negara kesatuan ini oleh karena aspek negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Tetapi **sebenarnya** kalau otonomi propinsi ini tidak **terbatas pada seluruh** propinsi yang ada sekarang **ini tapi kita** kembangkan, katakanlah bekas-bekas keresidenan ini dikembangkan jadi propinsi **maka ini tidak akan** membahayakan negara kesatuan. Contoh, Keresidenan Banten sekarang Undang-Undangnya sedang digarap dan ini juga sudah disetujui oleh DPR, saya kira akan menyusul yang lainnya. Kami setuju juga dengan bapak kalau misalnya kota-kota

yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional seperti Surabaya, Medan atau Makassar kita jadikan Kota Otonom seperti halnya DKI dan di bawahnya adalah kota-kota administratif, dan Undang-Undang Dasar itu sudah mencantumkan bahwa daerah Indonesia tidak dibagi habis kepada daerah yang bersifat otonom tetapi bersifat administratif belaka dan semuanya itu ditetapkan dengan Undang-undang.

Khususnya mengenai masalah cendana, memang otonomi kalau diberikan kepada tingkat kabupaten, akan mengejar target peningkatan pendapatan dan seperti kasus cendana (seperti yang tadi diangkat oleh bapak Wakil Gubernur), sedang menuju kemusnahan. Daerah mengejar kenaikan pendapatan untuk menjaga tingkat penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Urusan kehutanan diserahkan di tingkat kabupaten ternyata cendana menjadi musnah. Sesudah di propinsi-pun ternyata eksploitasi, kurang terkontrol. Seperti tadi telah diangkat oleh bapak Wakil Gubernur, target penebangan per tahun sebesar 600 ton, ternyata melampaui sampai 1000 ton.

Dengan adanya globalisasi, mungkin ada persaingan-persaingan (misalnya dengan India), sehingga merangsang penebangan cendana tak terkontrol yang bukan hanya pada pohon ber'teras' saja, tetapi dahan dan penggalian akar (karena minyak cendana lebih banyak terakumulasi di akar) yang menuju pada kemusnahan cendana.

Masalah hukum kita di Indonesia ini terutama "Undang-Undang Pedesaan" yang saya kira pada zaman Belanda, mengerti betul sehingga dibedakan antara Jawa dan Madura, dengan di luar Jawa dan

Madura. Jadi dengan adanya IGO dan IGOB jelas sekali, sehingga kepercayaan diberikan kepada masyarakat adat mengaturnya. Tetapi setelah merdeka rupanya kita lebih cenderung untuk mengambil "Undang-Undang Pedesaan dari Jogja", dan diseragamkan untuk seluruh Indonesia.

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), produksi cendana paling banyak, ternyata sekarang sudah menurun drastis. Kalau saja penebangan masih terus dilakukan, dalam 1 atau 2 tahun lagi akan habis. Kalau bisa (untuk sementara, seperti tadi dikatakan bapak Aca Sugandhi), jangan gantungkan ekonomi pada cendana; masih ada komoditi lain yang dapat kita manfaatkan dan ini merupakan tanggung jawab kita berotonomi.

Tanggap-balik Frans Seda untuk C Tapatab

Ya, yang membahayakan republik ini bahwa orang Indonesia, orang kita tidak taat pada cita-citanya. Tidak tahu apa yang dibuat sekarang menimbulkan ketegangan-ketegangan horisontal, ini yang mengacaukan, bukan adanya otonomi. Otonomi secara wajar, daerah-daerah yang mulai berkembang dan menuju ke arah kebebasan, ingin kebebasan yang lebih, wajar saja dan nanti republik ini harus mampu menampung pergerakan-pergerakan itu.

Saya ada satu pertanyaan kalau boleh saya bertanya. Bagaimana mengenai *tissue culture* (kultur jaringan, Red.) cendana itu, apa bisa dilakukan atau tidak, saya kira India bisa maju karena itu.

Aca Sugandhy untuk C Tapatab dan Frans Seda

Betul, kalau populasi cendana yang ada di *in-situ* dan upaya pembudidayaan di *ex-situ* belum menjamin keberlanjutan pohon cendana. Harus ada suatu batasan yang tegas terutama kalau populasinya memang sudah menuju kepunahan maka segera ada pembudidayaan cepat (dan jangan lama-lama!), dan harus diprogramkan dan jangan terlalu banyak penelitian-penelitiannya. Kalau

perlu ya kirim saja orang ke India untuk magang. Mengapa di sana bisa berkembang, kok kita tidak bisa. Harus diupayakan pendanaannya, kalau memang mau menyejahterakan NTT dari cendana, dan harusnya bisa!.

Masalah potensi yang lain, sebetulnya orang NTT terampil dalam memanfaatkan pewarna akar-akaran. Seperti pada tenun ikat yang banyak ragamnya di setiap pulau, berpotensi karena *demand* turis terhadap tenun ikat sangat tinggi. Mengapa akhirnya teknologi motif tenun ikat NTT diambil dan dikembangkan di Jepara. Sebaliknya orang NTT sendiri tidak terangkat, tidak berkelanjutan, yang berkelanjutan adalah Jepara.

Kemudian mengenai potensi turisme, NTT tidak pernah menjadi daerah tujuan wisata, karena syaratnya harus punya hotel berbintang lima dsb. Kalau dikaitkan dengan *sunshine*, dan *blue sky*, yang berhubungan dengan kegiatan turisme, ada di NTT.

Di sana pernah dicoba memanfaatkan teknologi pemanfaatan sinar matahari yang melimpah. Kalau teknologi ini sudah bisa dikembangkan, akan banyak membantu industri masyarakat setempat untuk pengembangan pedesaan. Kurangi orientasi pada teknologi tenaga air yang terbatas di NTT, atau tenaga diesel. Teknologi *sprink irrigation* (irigasi sebar, berorientasi hemat air, Red.), contohnya ada di Darwin, Northern Territory, Australia, bisa untuk pengembangan tanaman di NTT.

Perlu terus dilakukan pemetaan dan inventarisasi populasi cendana di setiap kabupaten, meliputi kuantitas, umur, produksi buah/biji, status kemusnahan dsbnya, sehingga regenerasi bisa terlindungi. Sistem penebangan bisa *tebang pilih*, tapi pembudidayaan *ex-situ* harus segera dilakukan dengan memakai anakan yang ada di alam.

Dalam masalah otonomi, bagaimana memberdayakan. Kalau sumberdaya alam setempat belum bisa mandiri untuk memberdayakan Tingkat II, jangan terburu-buru ke sana. Apakah otonomi itu di Tingkat II atau Tingkat I pun, nantinya dari

sudut lingkungan, pendekatan ekosistem itu harus tetap dilakukan karena ini menyangkut masalah keseimbangan antar wilayah.

Masalah *tissue culture* cendana yang dipertanyakan bapak Frans Seda, bisa saja. Teknologi itu alat, dalam rangka efisiensi atau mengejar *productivity* yang memang di alam itu sangat lambat. Dengan teknologi kultur jaringan yang memang bisa mempercepat proses alami itu.

SESI I:

Terhadap makalah H BanoEt, OH Soeseno,
S Darmokusumo, J Pello, Soekotjo
dan Hartono.

Abdulkadir Akhlis (anggota DPR-RI Daerah asal NTT, Fraksi PPP)

Saya juga mantan anggota DPRD Tingkat I dua periode, sehingga masalah cendana ini telah cukup saya gumuli. Dari enam pembicara ini saya kira tidak ada yang memberikan pada kita satu nuansa yang menggembirakan tapi semua merujuk kepada keprihatinan. Saya sangat gembira sekali bahwa hari ini ada pemain, pemain cendana juga ikut dalam seminar ini yaitu, Pak Hartono. Dari akumulasi permasalahan yang disampaikan oleh 6 pembicara ini sudah jelas bahwa cendana ini perlu dilestarikan. Kalau Pemerintah **peka** dan introspeksi diri masalah cendana ini sudah ditangani sejak 10 tahun yang lalu. Ada saksinya, mantan Bupati dan rekan-rekan dari anggota DPRD Tingkat I, juga hadir di sini.

Tidak usah menngisi susu yang tumpah tapi bagaimana mengisi kembali gelas yang kosong akibat tumpahnya susu. Ke depan PERDA NTT yang selama ini memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk berlindung sebagai pedagang itu perlu dicabut dan disesuaikan dengan kepentingan dan pemberdayaan rakyat yang berkembang.

Anakan cendana perlu didistribusikan kepada rakyat (melalui tua-tua adat atau kepala desa, sambil memperhatikan hukum warisan) yang

sebelumnya tidak mau menanam sebab menganggapnya sebagai 'kayu perkara' (tadi dikatakan haulasi, kalau orang Rote menyebutnya haunitu, kayu setan). Jadi (etimologi) haulasi itu betul sebab kalau kayu itu tumbuh di halaman atau tanah haknya, ia tidak bisa mengambil manfaat karena mengandung resiko. Ini suatu kekeliruan yang luar biasa dan memang Pemerintah Daerah sengaja memanfaatkan Perda (Peraturan Daerah) ini untuk bisa tetap berdagang. Bayangkan, rakyat hanya mendapat upah tebang (pada waktu itu) Rp. 300/kg, yang ditebangnya sekitar 10 sampai 15 km jarak dari TPK, dikuliti, dijemur dan diangkut, sehingga tapi pembayarannya terakhir setelah kayu ini habis dijual, sudah dibagi-bagi baru Rp. 300,- ini diberikan, jadi memang rakyat ini tidak punya rasa memiliki. Oleh karena itu sekarang sudah saatnya memberikan kembali hak-hak rakyat, Pemerintah hanya sebagai fasilitator, cukup mengambil pajak, dan sistem perdagangannya diserahkan kepada pasar.

Sepakat dengan Ibu Oemi bahwa ekosistem itu sangat memegang peranan yang penting, dalam hal ini burung-burung pemencar biji cendana di NTT yang oleh para sniper sudah dihabisi, di hutan-hutan tidak ada yang berkicau lagi.

Bupati Flores Timur.

Rakyat yang harus kita berdayakan, rakyatlah yang harus memberi tolok ukur utama daripada masalah komoditi itu. Dalam saat-saat demikian kami menyadari sekali bahwa menangislah kami di NTT karena komoditi utama kami sudah habis, Dan saat dalam keprihatinan dan kecewa, kami ingin mengembalikan NTT menjadi hijau dengan tegaknya cendana, dan bagaimana caranya bisa menegakkan kembali cendana di NTT.

Saya adalah salah satu bupati di NTT, paling ujung P. Flores itu adalah Kabupaten Flores Timur, di situlah saya menjadi bupati. Di ujung timur P. Flores ada satu pulau kecil namanya P. Solor. Ratusan tahun yang lalu P. Solor dikuasai oleh Portugal yang mendirikan sebuah benteng untuk

perdagangan. Perdagangan apa di sana? Ya....cendana itu. Kontrasnya, sekarang satu pohon cendanapun tidak ada di Solor. Pasca perjanjian antara Portugal dengan Belanda, P. Solor diserahkan ke tangan Belanda, yang melepaskan kekuasaannya di Timor Timur dan diserahkan kepada Portugal. Pada saat itulah cendana di P. Solor ditebang habis.

Sebagai bupati tentu saya ingin cendana ditegakkan lagi di Solor. Oleh karena itu pada kesempatan ini yang *pertama* saya minta pada Ibu Oemi dan Bapak Soekotjo tolonglah angkat saya menghijaukan kembali Solor yang masih banyak lahan-kering tidur yang sangat cocok untuk budidaya cendana. *Kedua*, tolonglah, semua orang bantu saya supaya cendana menjadi tegak kembali di Solor.

Dede Rohadi (Peneliti Puslitbang Hasil Hutan).

Untuk Pak Hartono, sebagai industri (PT Tropical Oil, Kupang) yang bergerak di bidang cendana, apakah mau melakukan investasi untuk menanam cendana di Timor?

Kepada pemrasaran yang lain, berkaitan dengan praktek pemanenan akar cendana yang dilakukan sekarang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Tetapi sebetulnya kalau dilihat dari dampak ekologisnya barangkali itu akan sangat merugikan, walaupun dihargai dengan sekitar Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000 /kg, karena untuk menanam cendana itu perlu beberapa puluh tahun dan memerlukan investasi besar, sementara akar itu potensial untuk regenerasi alami yang paling baik.

Seorang anggota masyarakat NTT

Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya adalah salah seorang masyarakat NTT yang peduli terhadap nasib NTT dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian semua yang hadir di sini untuk membicarakan NTT meskipun untuk 50 tahun mendatang. Bahwa ternyata untuk pengembangan dan pelestarian cendana, aspek

hukum bukan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan tapi paling tidak dengan perangkat hukum yang memadai itu bisa menjamin keterlibatan masyarakat dalam upaya pengembangan. Dalam hal ini kita fokuskan pada tanaman cendana. Pemerintah Daerah NTT dengan berbagai perkembangannya sudah berusaha untuk merubah, menyediakan perangkat hukum yang memadai.

Namun masih ada beberapa hal; *pertama*, pada tahun 1997 ada Peraturan Pemerintah Daerah (SK Gubernur No. 12/1997, Red.), melarang penebangan sampai dengan tahun 2003, mungkin bukan satu-satunya cara. Pemerintah Daerah, selain membenahi aspek hukum mungkin perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap penelitian dan pengembangan cendana. *Kedua*, ditujukan kepada Bapak BanoEt, mengenai tataniaga cendana. Kebijakan Operasi Pemutihan 1997, tanpa ada pengklasifikasian, cendana dihargai Rp. 1500/kg, telah memacu penebangan besar-besaran (tanpa memperhatikan ketentuan ukuran diameter batang) karena orang menganggap inilah kesempatan baginya. Belum lagi kita persalkan keterlibatan oknum-oknum Pemda dalam operasi itu bekerja sama dengan kepala desa atau pemerintahan setempat memanfaatkan operasi pemutihan kayu cendana dengan harga yang sangat murah untuk kepentingan bukan umum.

Tanggap Balik Para Pemakalah

Hartono

Terima kasih pada Bapak Dede Rohadi. Melihat keadaan di NTT, untuk investasi dalam penanaman cendana tidak memungkinkan karena persoalan tanah, meliputi antara lain kepemilikan dsbnya. Tapi saya kira bisa dilakukan dengan menyumbang melalui penyediaan anakan cendana kepada rakyat supaya bisa dilestarikan di halamannya sendiri sehingga di kemudian hari mereka bisa menikmati hasil tanaman cendana itu.

Jimmy Pello

Mencermati kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda), tampak masih sangat lemah, padahal teriakan soal otonomi itu kencang sekali. Saya menyarankan agar aspek hukum dalam Perda hams banyak memuat keadilan hukum karena dalam keadilan hukum, sarat moral dan moral ini ada kaitannya dengan unsur alam. Hal ini bisa kita lihat pada masyarakat Timor, ada Bano Haumeni yang sarat aspek moral dan aspek religius yang justru menyejukkan masyarakat.

Kontribusi pengusaha dalam pengembangan cendana belum nampak. Mungkin mereka melihat bahwa biaya reboisasi telah dibayar. Namun itu juga kadangkala menimbulkan persoalan lain sehingga saya menyarankan agar kita tetap juga melihat nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Masyarakat itu bisa diajak untuk ikut memelihara atau menanam cendana.

Pemanfaatan akar cendana dalam perdagangan juga harus dikaji kembali; pada peraturan yang lalu aspek akar ini beelum difasilitasi sehingga memberikan peluang untuk terjadinya penghancuran generatif dari cendana itu sendiri.

Surat Keputusan Gubernur (SK Gubemur No. 12/1997, Red.), harus segera dikaji lagi. SK ini justru menciptakan loncatan dalam masyarakat. Ketika SK dilaksanakan pada tahun 1997, setahun kemudian (1998) justru lebih banyak terjadi kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan): pencurian 4 kasus dan penadahan 71 kasus.

Tentang masalah monopoli, Pemerintah Daerah bisa tetap bertanggungjawab secara konseptual karena tanggung jawab Pemerintah tetap sangat diperlukan; mungkin dalam tataniaga, monopoli ini yang perlu dihentikan.

Oemi H Soeseno

Tampaknya semangat untuk membuat kepulauan di NTT menjadi hijau kembali karena tegakan cendana, besar sekali dari kita semua. Hanya pesan saya, kalau menanam cendana, sejauh mungkin

gunakanlah bibit setempat, jangan dibawa dari luar NTT seperti Jawa atau tempat lainnya, demi menjaga pemurnian jenis.

SESIII:

Terhadap makalah A Agusta, IK Surata,
S Riswan, Sunaryo, R Boer, M Rahman
Djuwansyah, M Hendrisman,
M van Noordwijk dan EA Husaini.

Oemi H Soeseno

Pertama, saya gembira sudah dilaksanakan uji provenan di lokasi Kupang; provenan dari mana saja? Kita harapkan mencakup provenan-provenan yang ada di Indonesia. *Kedua*, akan lebih baik kalau lokasinya tidak satu tempat, di mana cendana itu akan dikembangkan. Dengan demikian bisa dianalisis apakah itu akan ada interaksi di antara provenan dan bapaknya. Karena pekerjaan ini berat dan membutuhkan energi, uang dan waktu, sehingga kalau dilakukan sekaligus akan lebih baik. *Ketiga*, sistem silvikultur yang disampaikan tadi, agak sulit menggambarannya; apakah itu Tebang Pilih Indonesia itu akan diterapkan di NTT? Yang dimaksudkan, pada tegakan hutan yang sudah ada sekarang ini? Yang ada sekarang ini, di mana? Demikian juga untuk waktu mendatang, andaikata hutan tanaman itu dibentuk (kalau kita berbicara mengenai sistem silvikultur itu sudah barang tentu menyangkut masalah bentuk hutan yang kita inginkan), kalau bentuk hutan yang diinginkan adalah hutan seumur, sudah barang tentu sistem silvikulturnya ke arah hutan seumur. Tapi kalau yang diinginkan hutan tidak seumur, ya sudah barang tentu menggunakan sistem tebang pilih.

SB Silalahi (Badan Pertanahan Nasional)

Saya mengkaji khusus mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan masalah tanah. *Pertama*, barangkali Para Bapak Bupati yang hadir di sini mengetahui bahwa salah satu kendala yang sangat sulit dalam membangun di NTT adalah Tanah

Suku. Walaupun di jaman Orde Baru di mana Penguasa itu begitu berkuasa, tetapi banyak masih terbentur dengan masalah ini. Oleh karena itu masalah Tanah Suku, Tanah Ulayat ini perlu dikaji agar program pengembangan cendana di belakang hari tidak akan bermasalah. *Kedua*, di Republik kita ini banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjalanan Pasal 33 Ayat 3; saya hitung ada sekitar 35 buah. Kesepakatan antar instansi menyangkut Tata Ruang (misalnya Kehutanan, Pertambangan, Pemerintah Daerah) agar dijamin kelangsungannya di lapangan juga, sehubungan dengan Undang-Undang yang saling tumpang tindih. Dalam rangka otonomi, Pemerintah Daerah perlu coba melihat dan meluruskan mana yang bertentangan.

Di lapangan, tidak sejengkal tanahpun yang tidak berpunya, semua sudah dikuasai. Oleh karena itu, (sesuai dengan Pemrasaran dari Puslit Tanah dan Agroklimat) yang perlu diperhatikan adalah semacam pemetaan yang relatif detil. Kepada para Bupati kami menyarankan agar melaksanakan pemetaan (dalam rangka menyusun GIS ataupun NIS), sekaligus mengumpulkan data semua aspek sehingga biayanya lebih murah. Peta yang relatif detil bisa dipakai sebagai titik awal pola perencanaan atau pengembangan di daerahnya sendiri.

Tanggap-Balik Para Pemakalah

I Komang Surata

Pemuliaan pohon yang ada kaitannya dengan Uji Provenan, kami fokuskan pada daerah-daerah yang memungkinkan untuk pengambilan benih; karena kalau memakai benih dari luar NTT, dikhawatirkan akan menjadi masalah dan pengunduhan benih atau sumber benihnya juga tidak akan mencukupi. Kami mempunyai kantong-kantong produksi benih cendana yang potensial untuk pengambilan benih yaitu untuk di Aiton (Kabupaten Belu), di Kecamatan Miomafo (Kabupaten Timor Tengah Utara) dan di 7 sumber benih dengan sumber utama di Molo Utara (Kabupaten Timor Tengah Selatan)

paling banyak diambil. Di Sumba Timur juga kami jadikan sumber, kecuali Sumba Barat yang sudah tidak memungkinkan lagi karena potensinya juga sudah sangat menurun sekali.

Lokasi-lokasi untuk pengujian, kami fokuskan pada Stasiun Penelitian di Kabupaten TTU, Kabupaten TTS (menyebar), Sumba Timur dan di Kabupaten Kupang.

Endang A Husaeni

Ada 4 macam silvikultur dan saya mengadakan pilihan. Sebetulnya belum ada pengalaman mengenai sistem silvikultur cendana, yakni sistem silvikultur apa yang diterapkan; sehingga dalam makalah, saya mencoba mengurut sistem-sistem silvikultur yang berlaku di Indonesia dan sistem-sistem lain yang ada. Kalau kita tinjau, TPTI itu adalah sistem silvikultur yang paling rumit, untuk alam tropika sajakun sulit. Melirik ke cendana, potensi per hektar cendana rendah; data tahun 1983 hanya 0,49 ton/ha/tahun, bahkan data hasil tebangan sekarang tentunya sudah menurun lagi. Kemudian masalah rotasi TPTI belum jelas apakah 35 tahun. Demikian pula berapa limit diameter kayu teras TPTI cendana.

Tentang permudaan alam dari tunas. Di areal yang kami survei seluas 10.000 ha pada tahun 1985 di Timtim ditemukan permudaan alami hanya mencapai 4,8% (dari sampling). Jadi kalau ingin mengikuti model untuk mencapai 40% kehadiran permudaan seperti di hutan tropika itu hampir 880 pohon/ha, kalau seperti itu sudah mirip dengan membuat Hutan Tanaman di NTT.

Hambatan lainnya yaitu sumber biji untuk permudaan juga rendah. Data tahun 1925 menunjukkan nilai rendah juga. Sedangkan peranan cendana terhadap PAD sekarang sudah menjadi nol pada tahun 2000. Oleh karena itu, saya berpikir barangkali diterapkan sistem Tebang Habis Tebang Pilih, namun kita perlu membangun hutan tanaman dulu. Jika dari hutan tanaman itu ada permudaan, baru pada umur tertentu dilakukan tebang pilih. Tapi permasalahannya akan sama dengan TPTI.

Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) atau dengan penanaman kembali, ini juga bukan tanpa masalah. Referensi cukup banyak terutama pengalaman pengelolaan hutan jati di Jawa. Di India-pun perusahaan cendana dilakukan dengan sistem THPB. Sambil menunggu hasil-hasil penelitian lebih lanjut, saya sarankan penggunaan sistem THPB dengan daurnya 50 tahun.

Demi keberhasilan cendana, jangan memakai sistem penanaman dengan tehnik silvikultur seperti pada hutan-hutan biasa atau tanaman biasa dan harus lebih diintensifkan lagi. Dalam hal ini saya istilahkan pakai saja silvikultur intensif yang dicurahkan untuk memperoleh produk hutan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Rahm (1925) telah menyarankan jangka waktu daur 50 tahun, sama dengan saran Pak Surata (salah satu pemakalah, Red.). Hasil analisis ekonomi tahun 1989 dalam rangka Studi Kelayakan Cendana di Mutis-Timau, merekomendasi periode waktu daur dinaikan menjadi 60 tahun.

Marwan Hendrisman (Puslit Tanah dan Agroklimat, Bogor)

Menanggapi saran dan komentar dari Bapak Silalahi (BPN), Puslit Tanah baru memetakan tanah di NTT itu kurang-lebih baru 5 % dari luas lahan. Setuju dengan Bapak untuk melakukan pemetaan sumberdaya lahan secara terintegrasi yang harus melibatkan berbagai disiplin ilmu.